

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI
KABUPATEN BANYUMAS
(TAHUN 2011-2018)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh :
MUHAMAD ALI MA'SUM
NIM. 1423203106

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan mendasar yang dihadapi setiap negara dalam kebijakan awal pembangunan ekonomi selain target mengejar pertumbuhan ekonomi adalah aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sering dijadikan indikator kemajuan ekonomi, pada sebagian negara ternyata menyisakan persoalan. Di beberapa negara sedang berkembang tujuan tersebut kadang menjadi dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan dan persoalan kemiskinan (Hidayat, 2014: 2). Baru baru ini (2017) Bank Dunia merilis laporan berjudul “*Riding the waves: The East Asian Miracle in the 21st century*”. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia mengelompokkan penduduk disetiap negara kedalam 5 kelompok : miskin ekstrem, miskin moderat, rentan, *secure*, dan kelas menengah. Bank dunia menghitung untuk tahun 2015, hasilnya untuk Indonesia cukup mengkhawatirkan. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, dengan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 7.5% maka Indonesia hanya lebih baik dari Laos. Bahkan Kamboja hanya 0.7%. Thailand dan Malaysia sudah mencapai *zero extreme poverty* (Yusuf, 2018: 11).

Salah satu tujuan masyarakat dan negara kita di bidang perekonomian adalah keadilan dan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan dalam Islam dikenal dengan *al-falah*, *hayat al-tayyibah*, dan *maslahat al-'ibad*. Untuk mencapai tujuan ini sudah berkali-kali kita membuat rencana dan melaksanakan pembangunan berjangka, sehingga sedikit demi sedikit tingkat kemakmuran kita makin bertambah meskipun mungkin tingkat keadilannya belum terpenuhi (Partadireja, 1977: 3). Salah satu bentuk ketidakadilan dalam ekonomi adalah terjadinya ketimpangan. Ketimpangan adalah bukti kegagalan konsep pembangunan yang berorientasi pada pembangunan (Koalisi Masyarakat Sipil, 2015: 4).

Ketimpangan yang semakin lebar akan melahirkan berbagai ketidakpuasan, yang jika terus terakumulasi dapat menimbulkan keresahan yang berujung pada berbagai macam konflik. Konflik itu bisa terjadi antar masyarakat, antar daerah atau masyarakat dengan pemerintahan maupun antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ditoleransi (Jannah, 2016). Dalam perspektif ekonomi islam, upaya mengatasi Ketimpangan adalah dengan pendistribusian harta yang berkeadilan. Kebijakan distribusi dalam sistem ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai keadilan yang didasarkan pada konsep distribusi dalam al-Qur'an surah al-Hashr ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut bermaksud untuk menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia. Agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja. Harta benda harus beredar di masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat dengan tetap mengakui hak kepemilikan dan melarang monopoli, karena sejak awal Islam menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial. Berdasarkan ayat di atas, ekonomi Islam tidak membenarkan penumpukan kekayaan hanya pada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu. Bahkan menggariskan

prinsip keadilan dan persaudaraan (kasih sayang) pada konsep distribusinya. Pengelolaan kekayaan tidak dibenarkan hanya berpihak pada golongan atau sekelompok orang tertentu tetapi juga harus tersebar ke seluruh masyarakat. Sebaliknya Islam pun tidak memaksa semua individu diletakkan pada tingkat ekonomi yang sama. Agar kebijakan yang ditawarkan ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan seperangkat aturan yang menjadi prinsip dalam proses distribusi dan institusi yang berperan dalam menciptakan keadilan distribusi (Abdul, 2012).

Menurut Irma Aldeman dan Cyntia Taft Morris (dalam Arsyad, 1999: 226), ada delapan hal yang menyebabkan ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang yakni; (1) Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita, (2) Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proposional dengan pertambahan produksi barang-barang, (3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (4) Investasi yang banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan modal dari harta tambah besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah, (5) Rendahnya mobilitas sosial, (6) Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis, (7) Memburuknya nilai tukar (*term off trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang, (8) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Todaro (2004) menyatakan bahwa ketimpangan memiliki dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju dan berkembang untuk dapat

bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain adalah inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas. Serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil untuk kesejahteraan rakyatnya.

Sejak tahun 2001 dilaksanakan otonomi daerah di Indonesia, kebijakan otonomi daerah di bawah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 dengan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sehingga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunannya (Made, 2013). Hal ini memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber dayanya guna mencapai keadilan dalam ekonomi yaitu kemakmuran bersama serta mengurangi Ketimpangan antar wilayah kewenangannya. Oleh sebab itu pembangunan yang dilakukan berupaya untuk memberantas kemiskinan, mengurangi ketimpangan (Muljadi, 2011: 1).

Perkembangan kemajuan pembangunan suatu wilayah akan sangat ditentukan oleh empat faktor penentu. Pertama seberapa besar kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut (termasuk di dalamnya pengertian mengenai kualitas tenaga kerja sehingga dapat memberikan akses lokasi yang baik bagi perusahaan yang akan melakukan usaha di daerah tersebut). Kedua basis pembangunan daerah (dalam pengertian bahwa adanya pengembangan institusi ekonomi yang baik yang mampu mendorong ke arah peningkatan hasrat berusaha bagi kalangan dunia usaha), Ketiga asset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah yang di dasarkan pada kualitas lingkungan. Keempat sumber daya pengetahuan, dalam pengertian pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian (*Knowledge Base Development*) (Muljadi, 2011: 5),.

Pusat pembangunan Indonesia dan berjalannya roda perekonomian masih berpusat di Pulau Jawa, salah satu daerah yang potensial dalam pertumbuhan ekonomi adalah Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017

mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,27 %. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari peran pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten di dalamnya salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang terletak di Jawa Tengah, mempunyai 27 Kecamatan yang tersebar di seluruh penjuru wilayah. Kabupaten ini mempunyai julukan Kota Satria. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2017, Banyumas merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 1.741.077 Jiwa dan luas wilayah 1.335,30 KM². Jumlah penduduk di Kabupaten Banyumas setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana data dalam tabel jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2018

No	Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
1.	2011	1.574.001	*
2.	2012	1.590.011	16.010
3.	2013	1.605.579	15.568
4.	2014	1.620.918	15.339
5.	2015	1.635.909	14.991
6.	2016	1.650.625	14.716
7.	2017	1.665.025	14.400
8.	2018	1.679.124	14.099

Sumber : Data BPS, diolah Tahun 2019.

Dari data Tabel 1, menunjukkan peningkatan jumlah penduduk setiap tahun, dari rentang 2011-2018 di Kabupaten Banyumas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk tidak selalu menjadi suatu masalah, justru pertumbuhan penduduk dapat memacu pembangunan ekonomi, semakin banyak jumlah penduduk maka akan semakin meningkatkan potensi pasar domestiknya (Salma, 2018). Para ilmuwan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB (Produk Domestik Bruto) dan PDRB (Produk Domestik

Regional Bruto) saja, akan tetapi juga diberi bobot yang bersifat *immaterial* seperti kenikmatan kepuasan dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram yang dirasakan oleh masyarakat luas (Arsyad, 1999).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses pertumbuhan *output* perkapita jangka panjang yang terjadi apabila ada kecenderungan (*output* perkapita untuk naik) yang bersumber dari proses *intern* perekonomian tersebut (kekuatan yang berada dalam perekonomian itu sendiri), bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Atau dengan kata lain bersifat *self generating*, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri menghasilkan suatu kekuatan atau momentum bagi kelanjutan pertumbuhan tersebut dalam periode-periode selanjutnya. (Boediono, 1994). Berikut ini adalah grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas :

Gambar 1

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas



Sumber : Data BPS, diolah Tahun 2019.

Dilihat dari gambar 1, grafik laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas memiliki Pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih

tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu yang sama yang hanya berkisar 5,29%. Pertumbuhan ekonomi disisi lain akan menimbulkan masalah baru yaitu berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Di Indonesia ketimpangan distribusi pendapatan tidak terlepas dari adanya keragaman potensi sumberdaya alam, letak geografis, kualitas sumberdaya manusia, ikatan etnis atau politik. Keberagaman ini dapat menjadi sebuah keunggulan dalam satu sisi, namun disisi lain dapat berpotensi menjadi sumber instabilitas sosial dan politik nasional. Selain itu juga disebabkan karena mekanisme pasar, baik *input* maupun *output* terutama *capital* dan tenaga kerja dengan keterampilan atau pendidikan tinggi yang terdistorsi oleh kebijakan pemerintah yang bias ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan di sektor-sektor tertentu. Akibat distorsi tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar Provinsi/Kabupaten/Kota (Tambunan, 1996: 206-207). Salah satu ukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang sering digunakan adalah *Gini Ratio*. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berikut ini adalah tabel mengenai Indeks *Gini Ratio* di Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2018:

Tabel 2
Indeks Gini Ratio Tahun 2011-2018
Kabupaten Banyumas

Tahun	Indeks Gini
2011	0.35
2012	0.34
2013	0.36
2014	0.32
2015	0.32
2016	0.32
2017	0.36
2018	0.36

Sumber : BPS, diolah 2020.

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan angka ketimpangan Tahun 2011-2018 berdasarkan *Gini Ratio* Kabupaten Banyumas berada di level

sedang, dengan rata rata setiap tahunnya 0,34. Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang potensial, seiring bertambahnya laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi menyisakan permasalahan yang krusial yaitu permasalahan ketimpangan distribusi pendapatan. Tingkat ketimpangan Kabupaten Banyumas berada dilevel menengah, hal ini tentu tidak boleh dibiarkan karena ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tinggi akan menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan serta dapat menghambat proses pemerataan pembangunan untuk kemajuan Kabupaten Banyumas. Ketimpangan dapat diminimalisir dengan mencari faktor penyebabnya sehingga mempermudah dalam mencapai pembangunan yang merata. Kajian analisis faktor ketimpangan distribusi pendapatan diperlukan dalam mempermudah perencanaan pembangunan suatu daerah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik meneliti tentang “*Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan di Kabupaten Banyumas Pada Tahun 2011-2018*”.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya (Jujun, 2014). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang terjadi permasalahan didalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh PDRB atas dasar harga konstan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2011-2018?
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas pada tahun 2011-2018 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Dapat menjadi hal untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ketimpangan pendapatan dan pengeluaran, dan diharapkan dapat menjadi sebuah referensi serta pengembangan teori pada penelitian selanjutnya mengenai ketimpangan pendapatan dan pengeluaran.

b. Manfaat Praktisi

Sebagai referensi bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengambil keputusan penetapan kebijakan daerah terkait dengan distribusi pendapatan masyarakat.



IAIN PURWOKERTO

D. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar dari analisis penelitian, kerangka penelitian, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat deskripsi tentang variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, serta metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang uraian hasil yang diperoleh dalam penelitian dan pembahasannya yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data, serta pembahasan atas hasil pengelolaan data.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang uraian kesimpulan dan saran dalam penelitian.



IAIN PURWOKERTO

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen, adapun variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB (ADHK) dan jumlah penduduk, sedangkan variabel dependennya adalah ketimpangan pendapatan yang diukur dengan menggunakan variabel Indeks Gini antar kabupaten yang ada di Kabupaten Banyumas Tahun 2011-2018. Adapun Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan model Random effect. Adapun Hasil yang diperoleh dalam uji koefisien determinasi adalah variabel independent yang terdiri dari PDRB (ADHK) dan jumlah penduduk memperoleh Hasil sebesar 0.012559 atau sebesar 12.5%. adapun sisanya yaitu sebesar 87.5% dijelaskan oleh variabel lain diluar diluar model ini. Hubungan variabel PDRB(ADHK) dengan ketimpangan pendapatan didapatkan Hasil bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dikarenakan selama ini PDRB merupakan indikator pertumbuhan ekonomi yang dalam peningkatannya berdampak pada kenaikan ketimpangan pendapatan. Hasil koefisien yang didapat yaitu sebesar 0.00000000475 yang menandakan bahwa apabila PDRB (ADHK) naik sebesar 1 juta maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.00000000475 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang mana PDRB (ADHK) berpengaruh positif.
2. Hubungan variabel jumlah penduduk dengan ketimpangan pendapatan didapatkan Hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh positive

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas. Hasil koefisien yang didapat yaitu sebesar 0.0000000739 yang menandakan bahwa apabila jumlah penduduk naik sebesar 1 juta maka akan mampu meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0.0000000739 persen. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang mana Jumlah Penduduk berpengaruh positif.

B. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian pengaruh PDRB(ADHK) dan Jumlah Penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banyumas tahun 2011 – 2018 terdapat beberapa Implikasi yaitu:

1. Pemerataan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan pada seluruh golongan masyarakat menjadi tujuan utama dalam proses pembangunan ekonomi. Hal tersebut Harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat kesenjangan pendapatan merupakan permasalahan yang serius yang dihadapi oleh setiap daerah. Pembangunan yang ada bukan hanya pembangunan daerah yang bersifat terpusat namun juga yang dapat menjangkau daerah – daerah terpencil yang ada di Kabupaten Banyumas sehingga roda perekonomian dapat bergerak seimbang di setiap Kecamatan maupun ditingkat Desa.
2. Pemerintah Harus mempunyai regulasi yang mengatur jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Banyumas untuk dapat meningkatkan kualitas penduduk. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan lapangan pekerjaan yang ada seiring untuk menciptakan penduduk yang berkualitas terutama lapangan pekerjaan padat karya. Dimana hal tersebut dapat melatih kemampuan dan keahlian bagi penduduk non-produktif. Sehingga para penduduk non-produktif dapat memiliki pendapatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan merasakan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul, Husain At-Tariqi. 2004. *Ekonomi Islam (Prinsip, Dasar, dan Tujuan)*, Terj. M. Irfan Syofwani. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Al Faizah, SA. 2018. *Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Sulawesi (Tahun 2011-2015)*. [Skripsi]. Surakarta (ID) : UMP Surakarta.
- Arikunto, Suharmi. 2000. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1998. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, L. 1999, *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Banyumas. www.bpskabanyumas.go.id diakses pada Senin 16 September 2019 Pukul 08.00 WIB
- Banyumas. www.kemendagri.go.id diakses pada Jumat 12 Juli 2019 Pukul 12.18 WIB
- Banyumas. www.banyumas.go.id diakses pada Rabu 29 Januari 2020 Pukul 12.00 WIB
- Beik, Irfan Syauqi, LailyDwiArsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers..
- Boediono. 1994. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta : BPFE.
- Dumairy.1999. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Erlangga.
- Hadi, Sasana. 2009. *Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Volume 10, Nomor 1. Universitas Diponegoro.
- Hartadi, Riyan. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi, Sarjana Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sunan Kalijaga.
- Hartini, TN. 2017. *Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2015*. Skripsi. Yogyakarta : UNY.
- Hartono, Jogiyanto. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

- Hidayat, Wahyu. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan*. Malang : Penerbit UM Malang.
- Husein Umar. 2010. *Metode Riset Bisnis panduan mahasiswa untuk melakukan riset dilengkapi contoh proposal dan hasil riset bidang manajemen dan akuntansi Cetakan ke II*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Juliandi, Azuar. 2014. *Metode penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan : Umsu Press.
- Khairida, Jannah, et al. 2016. *Ketimpangan Pendapatan dan Pengeluaran antara Migran dan Non Migran di Banda Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Universitas Syah Kuala.
- Koalisi Masyarakat Sipil. 2014. *Ketidak Adilan Kesenjangan dan Ketimpangan: Jalan Panjang Menuju Pembangunan berkelanjutan pasca 2015*. Jakarta : InfidPress.
- Kuncoro, Mudrajad . 2007. *Metode Kuantitatif (Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi)*. Yogyakarta: UPP YPKN.
- Mahyudi. 2004. *Ekonomi Pembangunan Dan Analisis Data Empiris* . Bogor: Ghalia.s
- Moh. Prabundu Tika. 2006. *Metodelogi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moleong, LJ. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljadi, Badgja . 2011. *Pembangunan Ekonomi Wilayah : Pendekatan Analisis Tabel Input-Output*. Bandung : Unpad Press.
- Musfidar, Ma'mun. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010*. Skripsi Sarjana Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Noor, AG. 2012. *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*. Islamica. Vol. 6, No. 2. Hlm. 318
- Noor, Juliyansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, disertasi, tesis dan karya ilmiah*. Jakarta : KDT.
- Partadiredja, Ace. 1977. *Perhitungan Pendapatan Nasional*. Jakarta : LP3ES.
- Pertiwi, Pitma. 2015. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan kerja di Saerah Istimewa Yogyakarta*. [skripsi]. Yogyakarta (ID) : Fakultas Ekonomi.

- Riyadi, dkk. 2015. *Indikator kesejahteraan rakyat*. Jakarta : Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Setya, Awan, dkk. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Sjafrizal. 2009. *Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah*. Padang : Baduouse Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sumdi Suryabrata. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2008. *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Suprianto, Binar Dwiyanto, Pamungkas. “*Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010- 2015*”. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14, No. 2 (Agustus 2017), h. 190-191
- Suriasumantri, Ujun S. 2014. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tambunan, Tulus TH. 2001. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, Michael dan Smith. 2010. *Pembangunan Ekonomi; Edisi Kesembilan*. Jakarta : Erlangga.
- Umar, Husein . 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Utama, SK, et al. 2013. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di Kabupaten Gianyar*. *E Jurnal EP Unud*. Vol. 2. No. 3.
- Widarjono, A. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia FE UII.
- Wiratna, Sujarweni. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Buana Press.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Yusuf, AA. 2018. *Keadilan untuk Pertumbuhan*. Bandung : Unpad Press.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.